



Pengaruh Upah Minimum Kabupaten atau Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2016-2025

Kautsar Nabilatul Anwar¹, Restia Gustiana²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

Email: [surveyshezuka@gmail.com](mailto:surveyshizuka@gmail.com)¹, dosen02813@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2016–2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berjumlah 8 kabupaten/kota, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus), sehingga diperoleh data panel selama periode 2016–2025 dengan 80 observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 12, dan berdasarkan Uji Chow serta Uji Hausman diperoleh Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa (1) UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT dengan nilai probabilitas $0,0016 < 0,05$; (2) IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT dengan nilai probabilitas $0,4439 > 0,05$; dan (3) LPE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa UMK, IPM, dan LPE berpengaruh signifikan terhadap TPT dengan nilai Prob. (F-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,728703 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi TPT sebesar 72,87%, sedangkan sisanya sebesar 27,13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of the Regency/City Minimum Wage (UMK), Human Development Index (HDI), and Economic Growth Rate (LPE) on the Open Unemployment Rate (TPT) in Banten Province during the 2016–2025 period. This study employs a quantitative method with an associative approach. The research sample consists of all 8 regencies/cities in Banten Province, using a saturated sampling (census) technique, resulting in panel data comprising 80 observations over the 2016–2025 period. The data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews version 12. Based on the Chow Test and Hausman Test, the Fixed Effect Model (FEM) was selected as the most appropriate model. The partial test results indicate that: (1) the Regency/City Minimum Wage (UMK) has a negative and significant effect on the Open Unemployment Rate (TPT), with a probability value of $0.0016 < 0.05$; (2) the Human Development Index (HDI) has no significant effect on the Open Unemployment Rate (TPT), with a probability value of $0.4439 > 0.05$; and (3) the Economic Growth Rate (LPE) has a negative and significant effect on the Open Unemployment Rate (TPT), with a probability value of $0.0000 < 0.05$. The simultaneous test results show that UMK, HDI, and LPE have a significant effect on TPT, with a Prob. (F-statistic) value of $0.000000 < 0.05$. The coefficient of determination (R^2) of 0.728703 indicates that the three independent variables explain 72.87% of the variation in the Open Unemployment Rate, while the remaining 27.13% is explained by other variables outside the research model.

Keywords: Regency/City Minimum Wage (UMK), Human Development Index (HDI), Economic Growth Rate (LPE), Open Unemployment Rate (TPT).

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang terus mendapat perhatian besar dalam pembangunan, baik pada skala nasional maupun regional. Tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan berbagai efek buruk, seperti meningkatnya kemiskinan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan berkurangnya kemajuan ekonomi (Sirait et al., 2025). Untuk mengukur fenomena tersebut, analisis makroekonomi kerap menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merepresentasikan proporsi pencari kerja aktif terhadap total angkatan kerja yang tersedia (Badan Pusat Statistik, 2026). Lonjakan nilai TPT menjadi indikasi kuat bahwa pasar kerja belum mampu menampung seluruh suplai tenaga kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja ini dipicu oleh beragam faktor, mulai dari keterbatasan lapangan kerja, pergeseran struktur perekonomian, hingga kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan industri (Harahap et al., 2026).

Sebagai daerah penyangga Jakarta dengan zona industri yang berkembang pesat, Provinsi Banten memiliki aktivitas ekonomi yang kuat, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa TPT di kabupaten/kota Provinsi Banten berfluktuasi sepanjang tahun 2016–2025. Pada tahun 2016, Kota Cilegon mencatat TPT tertinggi sebesar 11,94%, sedangkan Kota Tangerang Selatan mencatat TPT terendah sebesar 6,48%. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memicu lonjakan pengangguran secara masif, dengan Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan TPT paling ekstrem dari 8,92% (2019) menjadi 13,06% (2020). Meskipun tren TPT menurun setelah pandemi, sejumlah daerah seperti Kabupaten Serang (8,73%) dan Kabupaten Pandeglang (8,80%) masih mencatat tingkat pengangguran yang relatif tinggi pada tahun 2025.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diduga menjadi salah satu variabel penentu naik-turunnya TPT. Secara teori, kenaikan UMK dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja, tetapi juga berpotensi menaikkan biaya produksi perusahaan sehingga mendorong pengurangan tenaga kerja. Data menunjukkan UMK di seluruh kabupaten/kota Provinsi Banten meningkat konsisten dari tahun 2016 hingga 2025, namun kenaikan tersebut tidak selalu linier dengan penurunan TPT – sebagaimana terlihat pada Kabupaten Tangerang yang UMK-nya naik dari Rp3.841.368 (2019) menjadi Rp4.168.268 (2020), sementara TPT justru meningkat dari 8,92% menjadi 13,06% pada periode yang sama.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh kabupaten/kota Provinsi Banten juga menunjukkan tren positif, dengan Kota Tangerang Selatan secara konsisten unggul (80,11 pada 2016 menjadi 84,81 pada 2025) dan Kabupaten Lebak berada pada posisi terendah (62,78 menjadi 69,24). Sementara itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) bergerak tidak stabil, mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 akibat pandemi sebelum pulih kembali pada kisaran 5,00–5,78% pada tahun 2025. Kesenjangan antara akselerasi LPE dan penurunan TPT masih terlihat, misalnya di Kabupaten Serang yang mencatat LPE 5,17% pada 2025 namun TPT-nya tetap tinggi di angka 8,73%.

Kajian empiris terdahulu juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Rahmawati et al. (2024) menemukan bahwa upah minimum berkontribusi positif dan signifikan terhadap TPT, sementara IPM memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Sebaliknya, Daroini dan Sriningsih (2025) menemukan bahwa IPM signifikan menurunkan TPT, namun UMK tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, Hadi et al. (2022) pada enam provinsi di Pulau Jawa menemukan bahwa LPE, IPM, dan UMK berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun

simultan terhadap TPT. Inkonsistensi hasil dari berbagai literatur tersebut memperkuat urgensi kajian lebih mendalam pada level kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan kesenjangan fenomena dan inkonsistensi temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten, baik secara parsial maupun simultan, selama periode 2016–2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen-Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) – terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian dilaksanakan pada delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berjumlah 8 wilayah administratif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian selama periode 2016–2025, menghasilkan 8 wilayah $\times$ 10 tahun = 80 observasi data panel.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, meliputi data TPT, UMK, IPM, dan LPE periode 2016–2025. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi BPS dan studi kepustakaan terhadap teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 12. Estimasi regresi data panel dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow (CEM vs FEM) dan Uji Hausman (FEM vs REM). Selanjutnya, model terpilih diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Jarque-Bera Test), uji multikolinearitas (Variance Inflation Factor/VIF), uji heteroskedastisitas (metode Glejser), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson Test). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan karakteristik data dari 80 observasi panel yang mencakup delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten selama tahun 2016–2025. Ringkasan hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Dev.
TPT (Y) (%)	8,40	4,13	13,06	1,91
UMK (X1) (Rp)	3.667.706	1.965.000	5.128.084	800.695,9
IPM (X2)	72,49	62,78	84,81	5,87

LPE (X3) (%)	4,36	-7,36	7,49	2,55
--------------	------	-------	------	------

Sumber: Data diolah, EVIEWS 12, 2026

Variabel TPT (Y) menunjukkan rerata 8,40%, bergerak dari 4,13% hingga 13,06% dengan standar deviasi 1,91, yang mencerminkan fluktuasi tingkat pengangguran antarwilayah dan antarperiode pada tingkat sedang. Variabel UMK (X1) mencatat rata-rata Rp3.667.706 dengan standar deviasi Rp800.695,9, menunjukkan ketimpangan standar pengupahan yang cukup mencolok antardaerah. Variabel IPM (X2) memiliki rata-rata 72,49 dengan standar deviasi 5,87, mencerminkan keragaman mutu modal manusia yang cukup tinggi. Adapun variabel LPE (X3) menghasilkan rata-rata 4,36% dengan rentang dari -7,36% hingga 7,49%, di mana nilai minus mengindikasikan kontraksi ekonomi yang terjadi di beberapa daerah pada tahun tertentu, terutama akibat pandemi Covid-19.

Melalui Uji Chow dan Uji Hausman, penelitian ini menetapkan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model estimasi terbaik. Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), yang berarti FEM lebih baik daripada Common Effect Model (CEM). Uji Hausman turut menghasilkan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), yang berarti FEM lebih baik daripada Random Effect Model (REM). Kesesuaian hasil kedua uji tersebut membuat pengujian Lagrange Multiplier (LM) tidak lagi diperlukan.

Model FEM yang terpilih selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik. Uji normalitas dengan metode Jarque-Bera menghasilkan nilai statistik 0,417397 dengan probabilitas 0,811640 ($> 0,05$), yang berarti residual model berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dengan indikator Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF seluruh variabel bebas berada di bawah 10 ($X_1 = 2,214276$; $X_2 = 2,260299$; $X_3 = 1,089148$), yang berarti model bebas dari masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menghasilkan nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,3696 ($> 0,05$), yang berarti model bersifat homoskedastis. Uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson menghasilkan nilai DW sebesar 1,932764, yang berada di antara nilai dU (1,7153) dan $(4 - dU)$ sebesar 2,2847, sehingga model dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi.

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18,40559	4,061900	4,531275	0,0000
UMK (X1)	-1,29E-06	3,91E-07	-3,289111	0,0016
IPM (X2)	-0,000553	0,000718	-0,770055	0,4439
LPE (X3)	-0,294273	0,051430	-5,721769	0,0000

Sumber: Data diolah, EVIEWS 12, 2026

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel UMK (X1) memiliki nilai probabilitas 0,0016 ($< 0,05$) dengan koefisien negatif, yang berarti UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Variabel IPM (X2) memiliki nilai probabilitas 0,4439 ($> 0,05$), yang berarti IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT. Variabel LPE (X3) memiliki nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) dengan koefisien negatif, yang berarti LPE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Hasil uji F menghasilkan nilai F-statistic sebesar 18,53341 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 ($< 0,05$), yang berarti UMK, IPM, dan LPE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap TPT. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,728703

menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 72,87% variasi TPT, sedangkan sisanya sebesar 27,13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten selama periode 2016–2025. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0016 yang lebih kecil dari 0,05. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan UMK dalam model penelitian ini cenderung diikuti oleh penurunan TPT. Dengan demikian, kenaikan tingkat upah minimum di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode penelitian tidak menunjukkan pola peningkatan pengangguran sebagaimana asumsi sederhana bahwa kenaikan biaya tenaga kerja selalu menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif Efficiency Wage Theory yang dikembangkan oleh Shapiro dan Stiglitz. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah tidak hanya berfungsi sebagai imbalan atas tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan pekerja. Ketika pekerja memperoleh tingkat upah yang relatif lebih baik, terdapat insentif yang lebih besar untuk mempertahankan pekerjaan, meningkatkan kinerja, dan mengurangi perilaku yang dapat merugikan perusahaan. Dalam konteks tersebut, kenaikan UMK tidak selalu harus dipahami semata-mata sebagai tambahan biaya produksi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai investasi terhadap kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Hubungan negatif antara UMK dan TPT juga dapat dipahami melalui mekanisme daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan pekerja dapat meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa berpotensi mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan tersebut selanjutnya dapat mendorong aktivitas produksi dan ekspansi usaha, sehingga menciptakan kebutuhan tenaga kerja tambahan. Dengan demikian, terdapat kemungkinan mekanisme tidak langsung bahwa peningkatan UMK mendorong permintaan agregat yang kemudian berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks Provinsi Banten, mekanisme tersebut menjadi relevan karena karakteristik ekonominya tidak hanya ditopang oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga perdagangan, jasa, konstruksi, dan berbagai aktivitas ekonomi perkotaan. Oleh karena itu, dampak perubahan UMK terhadap pasar kerja tidak dapat dilihat hanya dari sisi biaya tenaga kerja perusahaan. Kenaikan pendapatan pekerja juga dapat menciptakan efek permintaan yang memperluas aktivitas ekonomi. Hasil penelitian Ghazali dan Aji (2024) yang mengkaji pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Jawa Barat juga memberikan

dukungan empiris terhadap pentingnya variabel upah minimum dalam menjelaskan dinamika pengangguran regional. Temuan mengenai hubungan antara upah minimum dan pengangguran juga diperkuat oleh penelitian mengenai regional minimum wage di Indonesia yang menunjukkan bahwa kebijakan upah merupakan salah satu faktor penting dalam dinamika pasar kerja (Ramadan et al. 2024).

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2025) yang secara khusus menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan IPM terhadap TPT di Nusa Tenggara Barat. Kesamaan variabel tersebut memberikan relevansi komparatif bahwa hubungan antara kebijakan upah minimum dan pengangguran perlu dilihat bersama dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Artinya, pengaruh UMK terhadap TPT tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan kapasitas perekonomian daerah dalam menciptakan dan mempertahankan lapangan pekerjaan.

Namun demikian, hasil negatif dan signifikan dalam penelitian ini tidak berarti bahwa setiap kenaikan UMK secara otomatis akan menurunkan pengangguran. Hubungan tersebut merupakan temuan empiris dalam model dan wilayah penelitian yang digunakan. Besarnya dampak kebijakan upah minimum sangat mungkin dipengaruhi oleh struktur industri, produktivitas pekerja, kemampuan perusahaan membayar upah, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta kondisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kenaikan UMK perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang mampu mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,4439 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, perubahan IPM selama periode 2016–2025 belum dapat dibuktikan secara statistik memiliki hubungan langsung dengan perubahan TPT dalam model penelitian ini.

Secara teoritis, hasil tersebut tampak berbeda dengan Human Capital Theory yang dikembangkan oleh Becker. Dalam teori modal manusia, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kapasitas manusia dipandang sebagai bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta kemampuan seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Secara teoritis, peningkatan kualitas manusia seharusnya memperbesar peluang masuk ke pasar kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berlangsung secara langsung karena IPM merupakan indikator agregat yang mencakup dimensi yang luas, sedangkan pengangguran merupakan fenomena pasar kerja yang dipengaruhi oleh interaksi antara sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Tidak signifikannya IPM terhadap TPT dapat menunjukkan adanya employment mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kualitas atau kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan rata-rata pendidikan dan kualitas hidup belum tentu menghasilkan keterampilan yang secara langsung sesuai dengan kebutuhan industri. Seseorang dapat memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tetap mengalami pengangguran apabila bidang keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan struktur permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan hanya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga relevansi kualitas tersebut terhadap kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, IPM merupakan indikator pembangunan manusia yang bersifat makro. Peningkatan IPM suatu wilayah dapat terjadi karena perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara agregat, sementara peningkatan tersebut belum tentu diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketika pertumbuhan kualitas sumber daya manusia lebih cepat daripada kemampuan perekonomian dalam menyediakan pekerjaan yang sesuai, pengangguran terdidik bahkan dapat tetap muncul.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dalimunthe et al. (2022) yang menunjukkan bahwa hubungan indikator pembangunan manusia dengan persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan tidak selalu bersifat sederhana. Penelitian Jafba dan Juanda (2023) juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM, yang memperlihatkan bahwa hubungan antara pembangunan manusia dan kondisi pasar kerja perlu dianalisis bersama dengan variabel ekonomi lainnya. Pinem et al. (2023) juga memperlihatkan pentingnya melihat IPM bersama TPT dan kemiskinan karena pembangunan manusia tidak berlangsung dalam ruang ekonomi yang terpisah.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Suffah et al. (2025) yang menemukan adanya pengaruh signifikan IPM terhadap TPT. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik wilayah, periode penelitian, struktur perekonomian, tingkat urbanisasi, serta karakteristik pasar tenaga kerja yang berbeda. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan IPM dalam penelitian Banten tidak dapat diartikan bahwa pembangunan manusia tidak penting bagi ketenagakerjaan. Sebaliknya, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM perlu diterjemahkan ke dalam keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Dalam perspektif pembangunan manusia, kualitas pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi atau lama sekolah, tetapi juga pada peningkatan kompetensi praktis, keterampilan digital, kemampuan komunikasi, kewirausahaan, dan keterampilan teknis yang sesuai dengan perkembangan sektor ekonomi. Kajian Hilalludin (2025) mengenai perubahan sosial dan dinamika masyarakat digital juga dapat digunakan sebagai perspektif pendukung bahwa perkembangan sosial dan teknologi menghasilkan perubahan pada pola interaksi, kebutuhan kompetensi, serta bentuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian,

pembangunan manusia di era ekonomi digital membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan struktur pekerjaan.

Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan temuan Hilalludin dan Izzah (2026) mengenai strategi pembelajaran multikultural dalam pendidikan Islam. Meskipun konteks penelitian tersebut berbeda dengan ketenagakerjaan, gagasan mengenai pengembangan kapasitas individu melalui proses pendidikan memberikan perspektif bahwa kualitas manusia tidak hanya ditentukan oleh pencapaian pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga oleh kemampuan individu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam. Dalam konteks pasar kerja, kemampuan adaptasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan dunia kerja terus mengalami perubahan.

Dengan demikian, tidak signifikannya IPM terhadap TPT dalam penelitian ini justru memberikan temuan penting bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Kebijakan pembangunan manusia dan kebijakan ketenagakerjaan perlu dirancang secara terintegrasi agar peningkatan kualitas penduduk dapat benar-benar dikonversikan menjadi peningkatan kesempatan kerja.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Okun's Law yang dikembangkan oleh Arthur Okun. Hukum Okun menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan output ekonomi dan tingkat pengangguran. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, produksi barang dan jasa cenderung mengalami ekspansi. Ekspansi produksi membutuhkan tambahan faktor produksi, salah satunya tenaga kerja, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja dapat meningkat dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat mengurangi kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dan meningkatkan risiko pengangguran.

Dalam konteks penelitian ini, nilai t-statistic sebesar -5,721769 menunjukkan bukti statistik yang kuat mengenai hubungan negatif LPE dengan TPT dalam model. Namun, nilai t-statistic sebaiknya dipahami sebagai ukuran kekuatan bukti statistik terhadap hipotesis pengaruh, bukan sebagai ukuran langsung besarnya dampak ekonomi. Besarnya dampak substantif tetap perlu dilihat dari nilai koefisien regresi dan satuan masing-masing variabel.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Arifah dan Prabowo (2024) yang menganalisis determinan TPT pada berbagai daerah di Pulau Jawa. Penelitian Ghozali dan Aji (2024) juga menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan kondisi pengangguran regional. Selain itu, Saputra et al. (2025)

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel yang relevan dalam menjelaskan perubahan TPT di Nusa Tenggara Barat. Kesamaan hasil tersebut memperkuat argumentasi bahwa kapasitas ekonomi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan kesempatan kerja.

Hubungan tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep job creation. Pertumbuhan ekonomi yang berasal dari peningkatan aktivitas produksi, investasi, perdagangan, jasa, maupun pembangunan infrastruktur dapat membuka permintaan tenaga kerja baru. Akan tetapi, kualitas pertumbuhan ekonomi tetap menjadi aspek penting. Pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada sektor padat modal mungkin menghasilkan peningkatan output yang besar tanpa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang sebanding. Oleh karena itu, hubungan negatif antara LPE dan TPT dalam penelitian ini perlu dipahami dalam karakteristik struktur ekonomi Provinsi Banten selama periode penelitian.

Temuan Jafba dan Juanda (2023) mengenai hubungan PDRB, TPT, dan IPM juga memperlihatkan bahwa indikator ekonomi regional dan indikator sosial manusia memiliki keterkaitan dalam pembangunan daerah. Falah dan Rahmawati (2024) juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan PDRB per kapita, IPM, TPT, dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan ketika menganalisis persoalan pembangunan dan kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembangunan manusia dan kondisi pasar kerja.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Penguatan industri, UMKM, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, serta sektor-sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan tenaga kerja lokal dapat menjadi bagian dari strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat ketenagakerjaan.

Pengaruh UMK, IPM, dan LPE secara Simultan terhadap TPT

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa UMK, IPM, dan LPE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Prob. (F-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,728703 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam model mampu menjelaskan sekitar 72,87% variasi TPT, sedangkan 27,13% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa kondisi pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode penelitian memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan kombinasi faktor upah minimum, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang dimasukkan ke dalam model. Namun, R^2 tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti hubungan sebab-akibat sebesar 72,87%. Nilai tersebut menunjukkan proporsi variasi TPT yang dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan

hubungan kausalitas tetap bergantung pada desain penelitian, spesifikasi model, serta asumsi ekonometrika yang digunakan.

Hasil simultan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran merupakan fenomena multidimensional. UMK merepresentasikan aspek insentif dan pendapatan tenaga kerja, IPM merepresentasikan kualitas modal manusia, sedangkan LPE merepresentasikan dinamika aktivitas ekonomi. Ketiganya bekerja melalui mekanisme yang berbeda tetapi saling berhubungan. Kualitas manusia yang meningkat membutuhkan ruang ekonomi untuk diserap, sementara pertumbuhan ekonomi membutuhkan tenaga kerja yang produktif. Pada saat yang sama, tingkat upah harus mampu memberikan perlindungan dan insentif bagi pekerja dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Temuan ini sejalan dengan Saputra et al. (2025) yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan IPM secara bersama-sama sebagai faktor yang berkaitan dengan TPT. Hasil tersebut juga dapat dibaca bersama penelitian Falah dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa indikator ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dengan persoalan sosial-ekonomi daerah. Dengan demikian, strategi penanggulangan pengangguran tidak ideal apabila hanya menggunakan satu instrumen kebijakan.

Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan pada terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang menghubungkan tiga aspek utama, yaitu kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan kualitas pekerjaan. Peningkatan IPM perlu diikuti dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Sementara itu, kebijakan UMK perlu mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha mempertahankan dan memperluas kesempatan kerja.

Dari perspektif pembangunan sosial, peningkatan kualitas manusia juga tidak dapat dipisahkan dari kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Perubahan struktur sosial dan perkembangan masyarakat digital menunjukkan bahwa karakter pekerjaan terus mengalami transformasi (Hilalludin 2025). Oleh karena itu, strategi mengurangi pengangguran di masa mendatang membutuhkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan jumlah lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pekerjaan.

5. Implikasi Penelitian terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat dipertimbangkan dalam kebijakan ketenagakerjaan Provinsi Banten. Pertama, kebijakan UMK perlu ditempatkan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan sekaligus produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara UMK dan TPT, sehingga kebijakan pengupahan dalam konteks penelitian ini tidak menunjukkan pola bahwa peningkatan upah secara otomatis

meningkatkan pengangguran. Namun, penetapan UMK tetap perlu memperhatikan produktivitas, kondisi sektor usaha, dan kemampuan dunia usaha agar peningkatan upah dapat berjalan berkelanjutan.

Kedua, kebijakan peningkatan IPM perlu diarahkan lebih spesifik pada link and match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Tidak signifikannya IPM terhadap TPT menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan manusia belum secara otomatis menghasilkan penurunan pengangguran. Oleh sebab itu, program pendidikan vokasional, sertifikasi kompetensi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, magang, dan peningkatan keterampilan digital dapat menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada pertumbuhan yang bersifat inklusif dan employment-intensive, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan output daerah tetapi juga menciptakan kesempatan kerja. Pemerintah daerah dapat memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi sekaligus mendorong investasi yang menghasilkan keterkaitan dengan tenaga kerja lokal.

Keempat, integrasi kebijakan antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Dunia pendidikan perlu menyediakan kompetensi yang relevan, sementara dunia usaha dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan keterampilan dan perkembangan jenis pekerjaan.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengurangan TPT di Provinsi Banten tidak cukup dilakukan melalui satu kebijakan. Diperlukan kombinasi antara kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan dan produktivitas, pembangunan manusia yang berorientasi pada kompetensi kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan lapangan pekerjaan. Pendekatan terpadu tersebut menjadi penting karena 27,13% variasi TPT dalam model masih dijelaskan oleh faktor lain di luar UMK, IPM, dan LPE. Faktor seperti investasi, struktur industri, tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, migrasi, urbanisasi, perkembangan teknologi, dan ketidaksesuaian keterampilan dapat menjadi ruang penelitian lanjutan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengangguran di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2016–2025, yang berarti kenaikan UMK berjalan searah dengan penurunan TPT. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT, yang mengindikasikan bahwa akselerasi mutu modal

manusia belum berdampak langsung terhadap pengurangan pengangguran terbuka. Ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, yang menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi berhasil memacu penyerapan tenaga kerja baru. Keempat, secara simultan UMK, IPM, dan LPE berpengaruh signifikan terhadap TPT dengan kemampuan menjelaskan variasi sebesar 72,87%. Kelima, LPE merupakan determinan yang paling dominan dalam memengaruhi TPT, ditunjukkan oleh nilai t-statistic tertinggi sebesar -5,721769 dengan tingkat signifikansi 0,0000.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pamulang, dosen pembimbing, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten atas ketersediaan data yang mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, N. L., & Prabowo, P. S. (2024). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka pada 21 Daerah di Pulau Jawa. *Independent: Journal of Economics*, 4(1), 125–135. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i1.60920>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026.
- Dalimunthe, A. H. D., Aldiansyah, M. A., & Tambunan, K. T. (2022). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 76–85. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1183>
- Daroini, A. C., & Sriningsih, S. (2025). Studi Determinan PDRB, IPM, UMK Atas TPT di Provinsi NTB Untuk Periode 2017-2023. *eCo-Fin*, 7(1), 34–45. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.1674>
- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per capita, human development index, open unemployment rate, regional expenditure, and poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327>
- Ghozali, A. A., & Aji, T. S. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Jawa Barat. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 72–84. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i2.60933>
- Gustiah. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1988-2017 [Skripsi (S1)].
- Hadi, A. S., Riani, W., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2016-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 446–454. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4470>
- Harahap, L. M., Ampun, G. F. A., Sitanggang, G. A. M., Sitorus, L., Sukma, T. S., Sitanggang, S. S., & Sinaga, Y. B. (2026). Analisis Tingkat Pengangguran di

- Indonesia dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2020-2024. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1), 3089–0128. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1810>
- Helvira, R., & Putria Rizki, E. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Islamic Economics and Business (JISEB)*, 1(1), 53–62.
- Hilalludin, H. (2025). Anak Muda, Media Sosial, dan Agama yang Cair: Fenomenologi Hijrah Digital di Indonesia. *AL-BAYAN: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 40–54. <https://doi.org/10.35964/albayan.v5i1.403>
- Hilalludin, H., & Izzah, L. (2026). Multicultural Learning Strategies in Islamic Religious Education at Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, Yogyakarta. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 41–57. <https://doi.org/10.33474/ja.v8i1.24965>
- Jafba, G. P., & Juanda, R. (2023). Influence of Gross Regional Domestic Product and Open Unemployment Rate on the Human Development Index in Lampung Province for the Years 2017–2021. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 6(2). <https://doi.org/10.29103/jompe.v6i2.13753>
- Marpaung, R. A. R., Rahayu, F., & Sintia, I. (2022). Analysis of the Effect of Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in the Province of North Sumatra. *Outline Journal of Economic Studies*, 1(1), 51–61.
- Pinem, H. A., Simbolon, C. M., & Sinaga, U. A. (2023). Analysis of the Effect of the Human Development Index, the Open Unemployment Rate on the Poverty Rate in North Sumatra, 2004–2022. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5), 509–524. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4140>
- Rahmawati, Y., Izzati, R. N., & Luthfiyyah, F. N. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Banten. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 45–49.
- Saputra, D. D., Ismiwati, B., & Wafik, A. Z. (2025). The Effect of Economic Growth, Minimum Wage, Human Development Index on Open Unemployment Rate in West Nusa Tenggara (2019–2023). *Journal of Finance, Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.59827/jfeb.v4i1.255>
- Sirait, J. A., Tanjung, A. A., Ariza, D., Simbolon, D. S., Hidayat, N., & Dalimunthe, M. B. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Usia Produktif, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara pada Periode 2018-2024. *Jurnal IKRAITH-Ekonomika*, 8(3), 1087. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>
- Suffah, D. A. F., Rahmi, A. A., Farida, S. N., Ghifarry, A. N. S., Faristanti, N., & Rahajeng, A. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Tahun 2019-2023. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 257–264. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15655175>